

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan daerah.

Menurut Mahsun, dkk. (2015:115) Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi Informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut Bastian (2009:151) laporan keuangan adalah informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan, seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham penanaman modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut ditunjukkan untuk proses pertanggung jawaban kinerja manajemen. Dengan semakin kompleksnya organisasi dan kebutuhan pemakai, format pelaporan keuangan perlu dipecahkan dalam proses penyusunan sistem.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang ditujukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

1.1.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peranan Pelaporan Keuangan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Inter Generational equity*)

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan Menurut Mahsun,dkk. (2015:120) Tujuan secara khusus laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan manfaat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. mengidentifikasi sumber daya yang dapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum.
- b. mengidentifikasi sumberdaya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah dapat persetujuan dari DPR/DPRD.
- c. Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

- d. Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas.

1.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009 adalah sebagai berikut (IAI, 2019:35) sebagai berikut:

a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlahpos-pos berikut:

- 1) Aset tetap
- 2) Properti investasi
- 3) Aset tidak berwujud
- 4) Aset keuangan
- 5) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas
- 6) Aset biologik
- 7) Persediaan
- 8) Piutang dagang dan piutang lainnya
- 9) Kas dan setara kas

- 10) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual
- 11) Utang dagang dan terutang lainnya
- 12) Kewajiban diestimasi
- 13) Liabilitas keuangan
- 14) Liabilitas dan aset untuk pajak kini
- 15) Liabilitas dan aset pajak tangguhan
- 16) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual
- 17) Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan
- 18) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode:

- 1) Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
- 2) Dalam bentuk dua laporan:
- 3) Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah) dan laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif)

Laporan laba rugi komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode:

- 1) Pendapatan
- 2) Biaya keuangan
- 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
 - a) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
 - b) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
 - 1) Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali;
 - 2) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali.
 - 3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - 4) Laba rugi.
 - 5) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain

- 6) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.
- c. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
 - d. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Struktur catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
 - 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
 - 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
 - e. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atau pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas (Mahsun, dkk. 2015:65).

Menurut Mahsun, dkk (2015:81) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah daftar yang membuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:36) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk *finansial*, mencerminkan sumber-sumber penerimaan

daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Mahsun, dkk (2015:83-84) Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

a. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang Sah.

b. Belanja dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung diklasifikasikan menjadi belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan PNS daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasadana belanja modal.

3. Pembiayaan, dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo tertentu, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung.

1.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009:329) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002:122) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

1.1.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:121) Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut Mahsun, dkk. (2015:141) Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Lohman (2003) dalam buku Mahsun, dkk. (2015:141) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat atau metode yang digunakan melalui proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun suatu proses.

1.1.7 Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009:330) prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur dapat mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa yang mendatang. Adapun peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk sebagai berikut:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan pencapaian skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaan.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah dipenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

Sedangkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu :

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Menunjukkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.1.8 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009:337) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiansasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala bentuk yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Indikator pengeluaran (*outputs*) adalah suatu harapan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya pengeluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positifnya maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

1.1.9 Analisis Rasio Keuangan Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka diperlukan penguasaan terhadap:

- a. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi).
- b. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu.
- c. Teknik analisisnya.
- d. Segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional.

Menurut Horne dalam buku (Faud 2016:137) Rasio keuangan adalah merupakan indeks yang menggabungkan dua angka akuntansi dan diperoleh

dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi kinerja keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada didalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode (Faud, 2016:137).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran atau alat analisis yang digunakan untuk membandingkan angka-angka yang datanya tersedia pada laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, sehingga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif dan dapat menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.

1.1.10 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan

Menurut Faud (2016:138-143) Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satu Analisis Rasio Keuangan yang digunakan terdiri dari:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah \ Propinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Formula rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ada dua komponen yang berperan dalam menghitung rasio kemandirian yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah. Hasil perbandingan kedua komponen tersebut akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian bisa dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pihak eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah juga bisa dijadikan indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan lewat retribusi dan pajak yang dibayarkan. Kriteria untuk menunjukkan hubungan antara rasio kemandirian dengan tingkat kemandirian daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Kriteria Pola Hubungan Pusat dan Daerah dalam otonomi daerah
1	Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
2	Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
3	Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
4	Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber: Alfansa dan Wibowo (2022:153)

b. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan yang setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Menurut Zuhri dan Soleh (2022:191) rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan

positif atau mengalami peningkatan. Untuk menghitung rasio pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{RpXn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{RpXn} - \text{Xn} - 1$: Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

$\text{RpXn} - 1$: Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Kriteria untuk mengukur rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan

No	Kinerja Keuangan	Rasio Pertumbuhan
1	Rendah	0% - 25%
2	Sedang	>25% - 50%
3	Tinggi	>50% - 100%

Sumber: Zuhri dan Soleh (2022:191)

c. Rasio Aktifitas

Menurut Halim dalam Zuhri dan Soleh (2022:190) rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio belanja pembangunan ditunjukkan oleh rasio total belanja pembangunan dibandingkan dengan total APBD semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat akan semakin besar. Untuk menghitung rasio aktifitas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan} = \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur rasio aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Rasio Aktivitas

No	Kinerja Keuangan	Rasio Aktivitas
1	Rendah	0% - 25%
2	Sedang	>25% - 50%
3	Tinggi	>50% - 100%

Sumber: Zuhri dan Soleh (2022:191)

1.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rayhan Alfansa dan Puji Wibowo	Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. Jurnal Aktiva:Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4 (3), 2022, 150 – 168 Issn: 2686-1054	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dengan sesudah pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan potensi ekonomi di seluruh kabupaten/kota karena berkurangnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Penurunan potensi ekonomi tersebut berimbas pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah baik dari PAD maupun nonPAD sehingga secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah tidak mengalami perubahan. Menurunnya aktivitas ekonomi telah menyebabkan rencana pendapatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya target PAD yang tidak tercapai selama masa pandemi (rasio efektivitas berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis keuangan daerah - Menggunakan rasio kemandirian - Metode Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Tahun penelitian - Rasio kemandirian

			secara signifikan).		
2	Husni Mubarak dan Azmir Salman	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019). Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis	Metode Penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data di analisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada tahun 2017 s.d 2019 dapat di ukur secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Realisasi PAD sebesar 72,78%, belanja daerah 81,17% dan tingkat kontribusi hanya 9,40%. pada tahun 2018 Realisasi PAD sebesar 71,83 %, belanja daerah 89,67 % dan tingkat kontribusi mengalami peningkatan menjadi sekitar 14,49%. Pada tahun 2017 Realisasi PAD turun sebesar 52,69 %, belanja daerah 91,85% dan tingkat kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 13,70%. Penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas Realisasi PAD mengalami Penurunan, sedangkan Realisasi Belanja Daerah mengalami Kenaikan sementara kontribusi hanya berubah signifikan dari tahun 2017 ke 2018. Dengan tingkat efektivitas PAD fluktuatif terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis keuangan daerah - Metode Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Tahun penelitian - menganalisis PAD dan Belanja

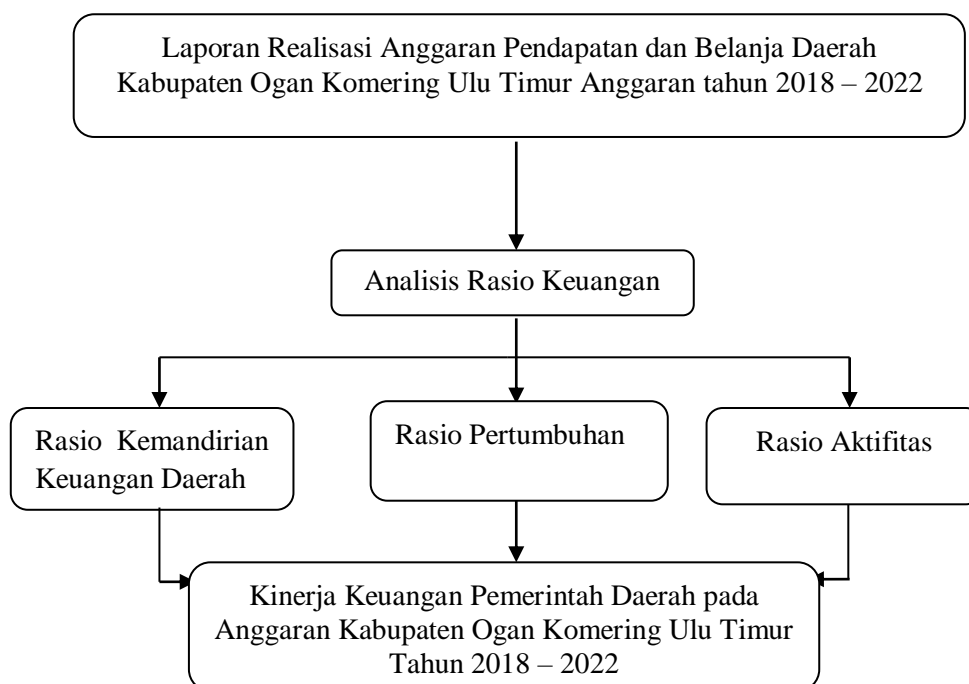
			Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 mencerminkan kinerja PAD tidak berbanding Lurus dengan Kinerja Belanja daerah.		
3	Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu	Metode analisis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2001-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%.	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis keuangan daerah - Menggunakan rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Tahun penelitian - Metode Kuantitatif
4	Rosita Wulandari	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. Scientific Journal Of Reflection: p-ISSN 2/615-3009 Economic, Accounting, Management and Business	Metode analisis menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan variabel kinerja keuangan adalah parameter atas terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Tentu, secara luas dapat dipahami, bahwa kinerja keuangan merupakan representatif dari kerja keras	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis keuangan daerah - Metode Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Tahun penelitian

		e-ISSN 2621-3389 Vol. 4, No. 2, April 2021	semua pihak yang profesional dan berintegritas. Sebagaimana hasil statistik regresi menunjukkan, pada dasarnya kinerja pemerintah provinsi sangat baik, terlebih adanya faktor yang mempengaruhinya seperti dana perimbangan, pendapatan pajak, dan belanja daerah. Secara akumulatif menunjukkan adanya keterkaitan secara linear, sehingga penting untuk memperhatikan ketiga faktor tersebut, khususnya faktor pendapatan pajak.		
5	Markus Rivaldo Yulinchton, Maria Bernadette Nani Ariani dan Nunuk Triwahyunigtyas	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship Vol. 11 No. 2 Juni 2022	Metode analisis menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, sedangkan rasio efektifitas berada pada area tidak efektif. Hasil lainnya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif, rasio keserasian berada pada kondisi tidak berimbang, dan rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis keuangan daerah - Menggunakan rasio kemandirian, pertumbuhan dan rasio aktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Tahun penelitian - Metode Kuantitatif

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang yang diteliti.

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 – 2022. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran